

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Belanja Sosial Sebagai Variabel Intervening

(Studi Kasus Wilayah Gerbangkertosusila Tahun 2018-2022)

Yunita Widya Rahayu¹, Tatas Ridho Nugroho², Nurdiana Fitri Isnaini³, Hartono⁴

Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Majapahit

Korespondensi Penulis : yunitawidya971@gmail.com

Abstract. *This study aims to test the effect of the independent variable on the dependent variable and test the intervening variable that can support the relationship of the independent variable to the dependent variable. The independent variables used in this study are Regional Original Income (PAD) and equalization funds, the dependent variable is financial performance, and the intervening variable used is social assistance spending. The sampling method used is the saturated sampling method. The total population in this study is 7 Regency / City Governments incorporated in the Gerbangkertosusila area in 2018-2022. Hypothesis testing in this study used Partial Least Square (PLS). The results of this study show that Regional Original Revenue (PAD) has a positive effect on financial performance. Meanwhile, the balancing fund and social assistance expenditure did not affect financial performance, and social assistance spending proved unable to support the relationship between Regional Original Revenue (PAD) and the balancing fund on financial performance.*

Keywords: *Local original revenue, equalization fund, social assistance expenditure, regional financial performance.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan menguji variabel intervening yang dapat mendukung hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan, variabel dependen adalah kinerja keuangan, serta variabel intervening yang digunakan adalah belanja bantuan sosial. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode sampling jenuh. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 7 Pemerintah Kabupaten/Kota yang tergabung dalam wilayah Gerbangkertosusila tahun 2018-2022. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Sedangkan dana perimbangan dan belanja bantuan sosial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, serta belanja bantuan sosial terbukti tidak mampu mendukung hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan.

Kata kunci : Pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja bantuan sosial, kinerja keuangan daerah.

A. PENDAHULUAN

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Pengukuran kinerja keuangan akan melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan. Dengan itu, maka dapat dipastikan apakah pengambilan keputusan sudah dilakukan secara tepat dan objektif. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut (Fajar & Rohman, 2012).

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Belanja Sosial Sebagai Variabel Intervening

Anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung (backbone) penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja (Burhan et al., 2022). Sumber pendapatan daerah sendiri bersumber dari pajak lokal, retribusi, serta PAD lain yang sah. Wilayah Gerbangkertosusila memiliki beberapa tantangan keuangan daerah berdasarkan APBD tahun 2018-2022. Masalah keuangan Pemerintah daerah di wilayah Gerbangkertosusila meliputi, 1) Ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat besar, hal ini tercermin dari tingginya pendapatan transfer pemerintah pusat, dibandingkan dengan pendapatan sebelumnya; 2) Kapasitas daerah untuk sumber pendapatan daerah sangat rendah hal ini tercermin dari relatif kecilnya pendapatan yang diperoleh dari PAD dibandingkan dengan pendapatan transfer; 3) Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah wilayah Gerbangkertosusila juga masih tergolong rendah yaitu masih berada dibawah 50% pada sebagian besar Kabupaten/Kota.

Pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam daerah karena digunakan untuk membiayai segala program-program yang direncanakan oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah (Antari & Sedana, 2018). Selain PAD, Dana Perimbangan juga merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap struktur APBD. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi. Faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja yaitu bantuan sosial. Belanja bantuan sosial termasuk dalam APBD yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Sehingga dengan adanya variabel belanja bantuan sosial ini dapat dilihat pula apakah sesuai dengan realitas kebutuhan masyarakat penerima bantuan, serta dapat dilihat pula tingkat kemiskinan dalam daerah tersebut.

Wilayah Gerbangkertosusila yang berpusat di Surabaya merupakan wilayah megapolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jabodetabek yang berpusat di Jakarta. Pembentukan Satuan wilayah Pembangunan (SWP) Gerbangkertosusila sendiri bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan antar daerah. Wilayah Gerbangkertosusila yang seharusnya memiliki kinerja keuangan yang baik, namun pada kenyataannya masih belum sepenuhnya optimal. Hal ini terjadi karena masih sebagian besar Kabupaten yang kinerja keuangannya buruk dan dibuktikan oleh rasio kemandirian keuangannya yang rendah. Bermula dari permasalahan tersebut maka wilayah Gerbangkertosusila dipilih menjadi objek dalam penelitian ini.

Maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah, serta dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang diprosikan melalui rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio efektivitas, dan rasio pertumbuhan dengan belanja bantuan sosial sebagai variabel intervening.

B. KAJIAN LITERATUR

1. Teori Keagenan

Dalam hubungan keagenan, terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan atau kontrak, yakni pihak yang memberikan wewenang atau kekuasaan (prinsipal) dan yang menerima kewenangan (agen). Jika dikaitkan dengan kinerja keuangan daerah, pemerintah pusat merupakan prinsipal dimana pemerintah pusat adalah pihak yang bertindak sebagai pemberi perintah dan bertugas untuk mengawasi, memberikan penilaian dan masukan atas tugas yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah. Menurut Verawaty et al., (2020) Jika kinerja keuangan daerah yang dikelola oleh pemerintah

daerah baik, kemampuan suatu daerah untuk mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah guna memenuhi kebutuhannya juga akan tercukupi dan tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat.

2. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan salah satu komponen penyusun pendapatan daerah dan unsur ini akan menjadi ciri khas suatu daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PAD tersusun dari unsur-unsur yaitu, 1) Pajak daerah, 2) Retribusi daerah, 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) Lain-lain PAD yang sah.

3. Dana Perimbangan

Dalam UU No. 33 Tahun 2004 disebutkan Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana perimbangan ini merupakan hasil kebijakan pemerintah pusat dibidang desentralisasi fiskal demi keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (pajak dan sumber daya alam) dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Menurut Armaja et al., (2017) dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

4. Kinerja Keuangan

Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Kinerja keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Pengukuran kinerja keuangan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Kinerja keuangan dapat diukur melalui rasio keuangan yang dihitung berdasarkan data keuangan daerah, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rasio tersebut dapat berupa rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian, rasio keserasian modal, dan rasio pertumbuhan pendapatan.

5. Belanja Bantuan Sosial

Menurut Pemendagri No. 39 Tahun 2012 bantuan sosial merupakan uang maupun barang yang diberikan pemerintah daerah untuk keluarga atau masyarakat bersifat tidak terus menerus yang tujuannya melindungi dari resiko social. Masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial antara lain ; (1) keluarga atau masyarakat yang keadaannya tidak stabil akibat dari krisis sosial, bencana alam maupun fenomena alam. (2) lembaga bukan pemerintahan dalam bidang keagamaan, pendidikan serta lainnya untuk melindungi keluarga, individu atau masyarakat dari resiko sosial.

C. HIPOTESIS

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan

Pendapatan asli daerah bersifat spesifik dan tidak akan bernilai sama antara satu daerah dengan daerah lainnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sari & Mustanda (2019) peningkatan pendapatan asli daerah akan berdampak pada peningkatan kinerja keuangan.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Belanja Sosial Sebagai Variabel Intervening

H1 = Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan

Dana Perimbangan merupakan salah satu perwujudan dari perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sebagai salah satu sumber pendapatan, dana perimbangan memainkan peran yang cukup krusial dalam pelaksanaan keuangan daerah. Semakin besar dana perimbangan, semakin besar sumber keuangan daerah sehingga akan mendorong kinerja keuangan daerah.

H2 = Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

3. Pengaruh Belanja Bantuan Sosial terhadap Kinerja Keuangan

Dalam penganggarannya, bantuan sosial dianggarkan atas daftar penerima bantuan sosial yang telah tercantum dalam keputusan kepala daerah yang sudah jelas nama, alamat penerima, dan besarnya pada saat penyusunan APBD. Hasil penelitian Isnaini et al. (2023) menunjukkan bahwa variabel belanja bantuan sosial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan karena adanya ketidakefektifan program bantuan dalam hal proporsi jumlah penerima bantuan, besaran nominal dan proses bersyarat penerima bantuan.

H3 = Belanja bantuan sosial berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan melalui Belanja Sosial

Selain meningkatkan kinerja keuangan, pendapatan asli daerah yang meningkat juga akan meningkatkan jumlah belanja bantuan sosial yang dikeluarkan. Alokasi pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja sosial secara signifikan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian Amalia, (2019) menunjukkan variabel PAD berpengaruh terhadap variabel Belanja Sosial. Semakin tingginya PAD yang didapatkan oleh suatu daerah maka Belanja Sosial yang dikeluarkan pemerintah juga akan semakin besar.

H4 = pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan melalui belanja sosial

5. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan melalui Belanja Sosial

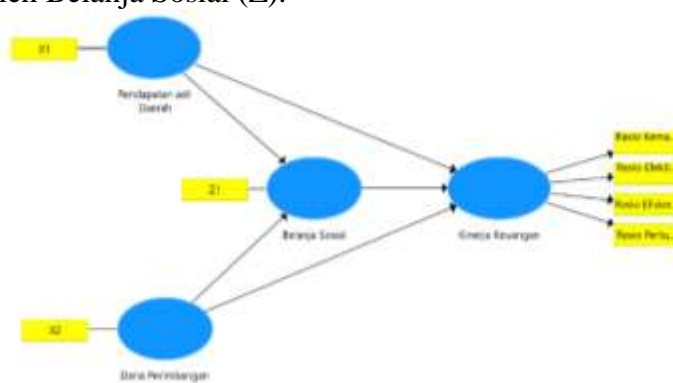
Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi. Adanya dana perimbangan ini tentunya akan menjadi salah satu sumber pembiayaan bagi belanja sosial. Hasil penelitian Amalia (2019) menunjukkan variabel dana alokasi umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap variabel Belanja Bantuan Sosial. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota masih sangat bergantung kepada Pemerintah Pusat dalam upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat.

H5 = Dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan melalui belanja sosial.

D. METODE PENELITIAN

Jenis desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis Partial Least Square (PLS) dengan model intervening menggunakan software SmartPLs. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh dari

Pendapatan Asli Daerah (X1), serta Dana Perimbangan (X2), terhadap Kinerja Keuangan (Y), yang diprosikan dengan Rasio Kemandirian, efektifitas, efisiensi, dan pertumbuhan, dengan dimediasi oleh Belanja Sosial (Z).



Gambar 1
Desain Penelitian

1. Populasi & Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh laporan APBD serta laporan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Gerbang Kertosusila tahun 2018-2022. Sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan metode sampling jenuh. Metode sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh laporan APBD dan laporan realisasi anggaran Kabupaten/Kota di wilayah Gerbang Kertosusila tahun 2018-2022.

2. Definisi Operasional Variabel

Didalam penelitian ini terdapat 2 variabel eksogen, 1 variabel endogen, dan 1 variabel intervening. Variabel eksogen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (X1) serta Dana Perimbangan (X2). Variabel endogen pada penelitian ini adalah Kinerja keuangan (Y) yang diprosikan dengan Rasio Kemandirian, efektifitas, efisiensi, dan pertumbuhan. Sedangkan untuk variabel intervening adalah Belanja Sosial (Z).

Tabel 1
Definisi operasional variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran
PAD (X1)	Penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain PAD yang Sah
Dana Perimbangan (X2)	Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah.	Dana Perimbangan = Dana Bagi Hasil + Dana Alokasi Umum + Dana Alokasi Khusus
R. Kemandirian (Y1.1)	Besar kecinya PAD dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain.	$RK = PAD / \text{Dana Perimbangan} \times 100 \%$
R. Efisiensi (Y1.2)	Perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh	Rasio Efisiensi = $\text{Belanja daerah} / \text{Realisasi PAD} \times 100 \%$

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Belanja Sosial Sebagai Variabel Intervening

	pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima	
R. Efektivitas (Y1.3)	Perbandingan besarnya realisasi PAD yang diperoleh dengan APBD atau target yang diharapkan sesuai dengan potensi rill daerah	Rasio Efektifitas = $\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$
R. Pertumbuhan (Y1.4)	Analisis kemampuan pemerintah daerah mempertahankan dan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerahnya.	Rasio Pertumbuhan = $\frac{P_n - P_0}{P_0} \times 100\%$
Belanja Sosial (Z)	Bagian realisasi belanja APBN yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk uang maupun barang kepada masyarakat	Belanja Sosial = Ln (belanja sosial)

Sumber: Data diolah peneliti, 2023

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis Partial Least Square (PLS) dengan menggunakan software SmartPLS. analisis PLS merupakan bagian dari analisis SEM (Structural Equation Modelling) yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran (outer model) sekaligus pengujian model struktural (inner model). Model pengukuran digunakan untuk uji validitas dan reliabilitas, sedangkan model struktural digunakan untuk uji kausalitas (pengujian hipotesis dengan model prediksi). Pada simulasi PLS, dilakukan pengujian statistik pada setiap hubungan yang akan dihipotesiskan. Metode *Bootstrap* adalah metode yang sesuai untuk diterapkan pada penelitian ini. Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai T-statistic dan juga P-value. Kriteria keputusan diambil H1 diterima apabila : T-statistic di atas dan sebanding dengan t-tabel dengan P-value di bawah dan sebanding 0,05. Sedangkan pengujian secara umum menggunakan t-test, jika alpha 5% ($\alpha = 0,05$), T-statistic di atas 1,96 (normal) dan P-value di bawah 0,05 tingkat signifikansi.

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Uji Statistik Deskriptif

Tabel 2
Uji Statistik Deskriptif

Konstruk Laten	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviasi
PAD (X1)	35	261.000	3157.000	2600.400	586.146
Dana Perimbangan (X2)	35	271.000	3048.000	2610.629	717.032
Kinerja Keuangan (Y)	35	1.000	2131.000	116.714	352.325
Belanja Bantuan Sosial (Z)	35	0.000	2526.000	1907.057	866.061

Sumber: Data diolah peneliti, 2023

Berdasarkan tabel statistik deskriptif diatas jumlah sampel yang digunakan sebanyak 35. Variabel PAD mempunyai rata-rata bernilai 2600.400 dan deviasi standarnya bernilai 586.146. Variabel Dana Perimbangan mempunyai rata-rata bernilai 2610.629 dan deviasi standarnya bernilai 717.032. Variabel Kinerja Keuangan mempunyai rata-rata bernilai 116.714 dan deviasi standarnya bernilai 352.325. Variabel Belanja Bantuan Sosial mempunyai rata-rata bernilai 1907.057 dan deviasi standarnya bernilai 866.061.

2. Uji Outer Model

a. Uji Validitas Reflektif

1) Uji Validitas Konvergen (*Convergent Validity*)

Tabel 3
Hasil Outer Loading

Variabel	Indikator	Outer Loading	Keterangan
PAD	Ln(PAD)	1,000	Valid
Dana Perimbangan	Ln(Dana Perimbangan)	1,000	Valid
Kinerja Keuangan	Rasio kemandirian	0,975	Valid
	Rasio Efisiensi	-0,105	Tidak Valid
	Rasio Efektivitas	-0,427	Tidak Valid
	Rasio Pertumbuhan	0,953	Valid
Belanja bantuan Sosial	Ln(Belanja Sosial)	1,000	Valid

Sumber: SmartPLS 3.0, Data diolah peneliti, (2023)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil uji yang menyatakan bahwa variabel kinerja keuangan yang dihitung melalui rasio efisiensi dan rasio efektivitas memiliki nilai Loading Factor $<0,7$ sehingga dinyatakan nilai tersebut tidak valid atau tidak dapat digunakan sebagai indikator variabel dalam penelitian ini. Sehingga peneliti melakukan revisi terhadap indikator yang dinilai tidak valid dengan cara menghilangkan indikator yang tidak valid tersebut. Setelah melakukan revisi pada uji validitas Outer Model dengan menghilangkan indikator rasio efisiensi dan rasio efektivitas, dengan menghilangkan kedua indikator tersebut maka nilai Loading factor dari masing-masing indikator memiliki nilai lebih dari 0,7. Sehingga keseluruhan data dapat dinyatakan valid, dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Revisi Outer Loading

Variabel	Indikator	Outer Loading	Keterangan
PAD	Ln(PAD)	1,000	Valid
Dana Perimbangan	Ln(Dana Perimbangan)	1,000	Valid
Kinerja Keuangan	Rasio kemandirian	0,996	Valid
	Rasio Pertumbuhan	0,993	Valid
Belanja bantuan Sosial	Ln(Belanja Sosial)	1,000	Valid

Sumber: SmartPLS 3.0, Data diolah peneliti (2023)

Dari data diatas merupakan hasil dari perhitungan algoritma SmartPLS yang dihitung kembali dan direvisi sehingga menghasilkan keseluruhan data penelitian yang nilainya valid atau nilai *Outer loading* dari masing-masing indikator lebih dari 0,7.

2) Uji Validitas Diskriminan (*Discriminant Validity*)

Tabel 5
Hasil Cross Loading

Indikator	PAD (X1)	Dana Perimbangan (X2)	Kinerja Keuangan (Y)	Belanja Bantuan Sosial (Z)	Ket
X1	1,000	-0,032	0,178	-0,215	Valid

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Belanja Sosial Sebagai Variabel Intervening

X2	-0,032	1,000	0,070	-0,122	Valid
Y1.1	0,195	0,081	0,996	-0,480	Valid
Y1.4	0,153	0,055	0,993	-0,368	Valid
Z	-0,215	-0,122	-0,434	1,000	Valid

Sumber: SmartPLS 3.0, Data diolah peneliti, (2023)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap indikator pada masing masing variabel penelitian mempunyai nilai cross loading yang tinggi pada tiap variabel serta memiliki nilai cross loading yang tinggi dibandingkan dengan variabel lainnya. Maka dapat dikatakan jika indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini sudah mempunyai nilai discriminant validity yang baik untuk mengatur tiap variabelnya.

Uji Discriminant validity juga digunakan untuk melihat nilai dari average variant extracted (AVE). AVE disini digunakan untuk mengetahui mengenai tercapainya syarat dari validitas diskriminan. Nilai AVE dapat dikatakan mencapai tingkat keandalan jika mencapai nilai sebesar 0,50. Maka dari itu untuk terpenuhinya syarat validitas dari tiap indikator maka harus memenuhi syarat yaitu dengan nilai harus >0,5 agar mendapatkan hasil yang baik. Berikut ini adalah tabel dari nilai average variant extracted (AVE):

Tabel 6
Hasil average variant extracted (AVE):

Konstruk Laten	Average Variance Extracted (AVE)	Keterangan
PAD (X1)	1,000	Valid
Dana Perimbangan (X2)	1,000	Valid
Kinerja Keuangan (Y)	0,989	Valid
Belanja Bantuan Sosial (Z)	1,000	Valid

Sumber: SmartPLS 3.0

Berdasarkan tabel AVE diatas dapat dilihat bahwa nilai AVE dari variabel PAD, dana perimbangan, kinerja keuangan dan belanja bantuan sosial >0,5. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa jika tiap variabel telah memiliki discriminant validity yang baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa bahwa penilaian tersebut sudah melengkapi standar dari validitas konvergen.

b. Uji Reabilitas Reflektif

1) Cronbach's Alpha

Tabel 7
Hasil Cronbach's Alpha

Konstruk Laten	Cronbach Alpha	Keterangan
PAD (X1)	1,000	Reliabel
Dana Perimbangan (X2)	1,000	Reliabel
Kinerja Keuangan (Y)	0,989	Reliabel
Belanja Bantuan Sosial (Z)	1,000	Reliabel

Sumber: SmartPLS 3.0, Data diolah peneliti (2023)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai dari cronbach's alpha dari tiap variabel penelitian adalah $>0,6$. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa keseluruhan dari variabel telah memenuhi syarat perolehan data penelitian yang menunjukkan konsistensi internal atau dapat diandalkan. Jadi keseluruhan data variabel dinilai sangat reliabel.

2) Composite Reliability

Tabel 8
Hasil Composite Reliability

Konstruk Laten	Composite Reliability	Keterangan
PAD (X1)	1,000	Reliabel
Dana Perimbangan (X2)	1,000	Reliabel
Kinerja Keuangan (Y)	0,995	Reliabel
Belanja Bantuan Sosial (Z)	1,000	Reliabel

Sumber: SmartPLS 3.0, Data diolah peneliti (2023)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai composite reliability dari masing-masing variabel penelitian memiliki nilai $>0,8$. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa keseluruhan dari variabel telah memenuhi syarat perolehan data penelitian yang menunjukkan konsistensi internal atau dapat diandalkan. Jadi keseluruhan data variabel dinilai sangat reliabel.

3. Uji Inner Model

Dalam analisis inner model terdapat beberapa pengujian untuk model struktural (Inner Model), seperti (1)R-Square, (2) Effect Size (f^2), (3) Q-Square (Q²), (4) Goodness of Fit (GoF). Berikut adalah penjelasan dari masing-masing model:

a. R-Square (R²)

Tabel 9
Hasil R-Square

Konstruk Endogen	R Square
Belanja Bantuan Sosial (Z)	0,063
Kinerja Keuangan (Y)	0,196

Sumber: SmartPLS 3.0, Data diolah peneliti (2023)

Bersumber dari sajian informasi di atas, maka dapat dinyatakan bahwa nilai R-Square untuk variabel Belanja Bantuan Sosial sebesar 0,063 dan Kinerja Keuangan sebesar 0,196. Perolehan nilai tersebut menjelaskan bahwa hasilnya berada dibawah 0,19 dan diantara 0,19 – 0,33 maka berada pada kriteria lemah.

b. Effect size (F²)

Tabel 10
Hasil Effect size (F²)

Konstruk Laten	Kinerja Keuangan	Indikasi
X1	0,010	Lemah
X2	0,001	Lemah
Z	0,197	Sedang
X1*Z	0,051	Lemah

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Belanja Sosial Sebagai Variabel Intervening

X2*Z	0,018	Lemah
------	-------	-------

Sumber: SmartPLS 3.0, Data diolah peneliti (2023)

Berdasarkan hasil pengujian diatas dapat dilihat bahwa nilai Effect Size (f^2) variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sebesar 0,010, untuk nilai variabel dana perimbangan yaitu sebesar 0,001, untuk nilai variabel belanja bantuan sosial yaitu sebesar 0,197, untuk nilai interaksi variabel Pendapatan Asli Daerah dan belanja bantuan sosial yaitu sebesar 0,051, dan yang terakhir untuk nilai interaksi variabel dana perimbangan dan belanja bantuan sosial yaitu sebesar 0,018. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengaruh konstruk endogen untuk variabel belanja bantuan sosial memiliki pengaruh sedang, untuk variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan, interaksi pendapatan asli daerah dan belanja bantuan sosial, ineraksi dana perimbangan dan belanja bantuan sosial memiliki pengaruh lemah.

c. Q-Square (Q²)

$$Q^2 = 1 - (1-0,063)(1-0,196)$$

$$Q^2 = 1 - (0,937)(0,804)$$

$$Q^2 = 1 - 0,753348$$

$$Q^2 = 0,246652 = 0,247$$

Hasil perhitungan Q-Square (Q²) ini sebesar 0,247 atau 24,7% artinya tingkat keberagaman model yang ditunjukkan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya sebesar 24,7% dan sisanya 75,3% masih dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya atau variabel lain yang tidak ada pada penelitian ini.

d. Goodness of Fit (GoF)

$$GoF = \sqrt{AVE \times R^2}$$

$$GoF Y = \sqrt{0,989 \times 0,196^2} = 0,038$$

$$GoF Z = \sqrt{1,000 \times 0,063^2} = 0,125$$

Berdasarkan hasil pengujian diatas dapat diketahui bahwa nilai dari Goodness of Fit (GoF) Y 0,038 dan GoF Z sebesar 0,125 dimana nilai GoF dikatakan lemah karena tidak mencapai >0,36. Artinya tingkat keberagaman model yang ditunjukkan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya sebesar 0,038 atau 3,8% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya atau variabel lainnya yang tidak ada pada penelitian ini. Dengan demikian dari hasil perhitungan tersebut maka model penelitian ini dapat dinyatakan memiliki Goodness of Fit (GoF) yang lemah.

4. Pengujian Hipotesis

Tabel 11
Uji Hipotesis

Hipotesis	Path	Sampel Asli	T-Statistik	P-Values	Indikasi
H1	X1 -> Y	0,090	2,359	0,046	Signifikan
H2	X2 -> Y	0,023	0,281	0,779	Tidak Signifikan
H3	Z -> Y	-0,412	1,322	0,187	Tidak Signifikan
H4	X1*Z -> Y	0,090	1,194	0,233	Tidak Signifikan
H5	X2*Z -> Y	0,053	1,182	0,238	Tidak Signifikan

Sumber: SmartPLS 3.0, Data diolah peneliti (2023)

Pada hipotesis pertama menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil nilai T-Statistic sebesar 2,359 ($>1,96$) dan P-Value sebesar 0,046 ($<0,05$). Pada hipotesis kedua menunjukkan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil nilai T-Statistic sebesar 0,281 ($<1,96$) dan P-Value sebesar 0,779 ($>0,05$). Pada hipotesis ketiga menunjukkan bahwa belanja bantuan sosial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil nilai T-Statistic sebesar 1,322 ($<1,96$) dan P-Value sebesar 0,187 ($>0,05$). Pada hipotesis keempat menunjukkan bahwa belanja bantuan sosial tidak berpengaruh dalam memediasi PAD terhadap kinerja keuangan. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil nilai T-Statistic sebesar 1,194 ($<1,96$) dan P-Value sebesar 0,233 ($>0,05$). Pada hipotesis kelima menunjukkan bahwa belanja bantuan sosial tidak berpengaruh dalam memediasi dana perimbangan terhadap kinerja keuangan. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil nilai T-Statistic sebesar 1,182 ($<1,96$) dan P-Value sebesar 0,238 ($>0,05$).

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan

Hasil menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah khususnya pada Pemerintah yang tergabung dalam Gerbang Kertosusila, sehingga hipotesis diterima. Hasil penelitian ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari & Mustanda (2019) yang menyatakan peningkatan pendapatan asli daerah akan berdampak pada peningkatan kinerja keuangan. Peningkatan pendapatan daerah dapat menyebabkan terjadinya peningkatan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri segala kegiatan daerahnya sehingga memberikan indikasi bahwa pemerintah daerah telah memiliki kinerja yang baik. Semakin tinggi pendapatan asli daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah maka akan berpengaruh pada tingginya kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang memiliki pendapatan asli daerah yang tinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki kemandirian dalam membiayai pengeluaran daerah.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan

Hasil menunjukkan bahwa Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah khususnya pada Pemerintah yang tergabung dalam Gerbang Kertosusila, sehingga hipotesis ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Ramadani & Muslimin (2022) dan Simamora & Budiwitjaksono (2022) yang menyatakan dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut kemungkinan karena pemanfaatan dana perimbangan yang kurang efektif, disini penggunaan yang tidak tepat sasaran, bersifat konsumtif dan spekulatif, sehingga menurunkan produktivitas dalam peningkatan PAD kemudian meningkatkan ketergantungan terhadap pihak lain terutama pemerintah pusat dan menyebabkan dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Belanja Bantuan Sosial terhadap Kinerja Keuangan

Hasil menunjukkan bahwa belanja bantuan sosial tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah khususnya pada Pemerintah yang tergabung dalam Gerbang Kertosusila, sehingga hipotesis ketiga ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh (Isnaini et al., 2023) yang menyatakan Belanja bantuan sosial tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja keuangan daerah. Tidak adanya pengaruh antara belanja bantuan sosial terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota di wilayah

Gerbangkertosusila disebabkan belanja bantuan sosial yang dilakukan Kabupaten/Kota kurang mengacuh pada kepentingan publik yang menyeluruh sehingga dampak dari belanja bantuan sosial kurang dirasakan masyarakat.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan melalui Belanja Sosial

Hasil menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah yang dimediasi oleh belanja bantuan sosial tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah khususnya pada Pemerintah yang tergabung dalam wilayah Gerbangkertosusila, sehingga hipotesis keempat ditolak. Secara teori makro disampaikan bahwa semakin banyak pengeluaran dari sisi konsumsi (variabel C) maka akan meningkatkan sisi Pendapatan nasional (Y). Namun pada penelitian ini hasil yang didapatkan adalah besarnya belanja bantuan sosial tidak dapat meningkatkan pendapatan daerah yang akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan. pendapatan yang tinggi tidak membawa pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, sehingga diduga kinerja bukan karena banyak sedikitnya uang dalam perekonomian, namun peran masyarakat dan juga pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah. Dalam penelitian ini, tidak ditemukan fakta memadai bahwa memberikan bantuan sosial akan meningkatkan kinerja keuangan, namun diakui bahwa bantuan sosial membantu untuk golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan melalui Belanja Sosial

Hasil menunjukkan bahwa dana perimbangan yang dimediasi oleh belanja bantuan sosial tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah khususnya pada Pemerintah yang tergabung dalam Gerbang Kertosusila, sehingga hipotesis kelima ditolak. Secara kebijakan fiskal pemerintah dapat melakukan penyesuaian dalam pendapatan dan penegluaran sebagaimana ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara atau APBN untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik dan laju pembangunan ekonomi yang dikehendaki. Hal tersebut terjadi kemungkinan karena pemanfaatan dana perimbangan yang kurang efektif, disini penggunaanya tidak tepat sasaran, bersifat konsumtif dan spekulatif, sehingga menurunkan produktivitas dalam peningkatan PAD kemudian meningkatkan ketergantungan terhadap pihak lain terutama pemerintah pusat dan menyebabkan dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
2. Dana perimbangan tidak berpengaruh dari terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Belanja bantuan sosial tidak berpengaruh dari terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
4. Belanja bantuan sosial tidak berpengaruh dalam memediasi hubungan antara PAD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
5. Belanja bantuan sosial tidak berpengaruh dalam memediasi hubungan antara dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

G. REFERENCES

Agustien Sendouw, A.Rumate, V., & Debby Ch. Rotinsulu. (2013). PENGARUH BELANJA MODAL, BELANJA SOSIAL, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KOTA MANADO. *Paper Knowledge . Toward a Media*

History of Documents, 12–26.

- Amalia, R. S. I. (2019). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, JUMLAH PENDUDUK MISKIN TERHADAP BELANJA BANTUAN SOSIAL (Studi Empiris Se-Pulau Jawa 2017)*. 12.
- Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(2), 1080. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v7.i02.p19>
- Ariwibowo, T. (2015). Pengaruh Dana Perimbangan Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi*, 11, 335–344.
- Armaja, A., Ibrahim, R., & Aliamin, A. (2017). PENGARUH KEKAYAAN DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN (Studi pada Kabupaten/Kota di Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(2), 168–181. <https://doi.org/10.24815/jped.v3i2.8229>
- Awani, M. F., & Hariani, S. (2021). Analisa Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 95–102. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i2.158>
- Burhan, M., Kartini, K., & Said, D. (2022). Pengaruh Kemandirian Keuangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi. *Al-Buhuts*, 18, 296–310. <https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ab/article/view/2946>
- Fajar, N., & Rohman, A. (2012). PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN KINERJA KEUANGAN DAERAH DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Kasus di Propinsi Jawa Tengah). *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(2), 1–14. <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/8707>
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan daerah. In *Progress in Retinal and Eye Research* (4th ed., Vol. 561, Issue 3). salemba Empat.
- Heryanti, C. D., Wahidahwati, W., & Suryono, B. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(1). <https://doi.org/10.25139/jaap.v3i1.1721>
- Isnaini, N. F., Armin, R., Dwi, A., Ekonomi, F., & Islam, U. (2023). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, Belanja Bantuan Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Daerah di Jawa Timur*. 6, 159–173.
- Lestari, N. K. L., & Supadmi, N. L. (2017). PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL, INTEGRITAS DAN ASIMETRIS INFORMASI PADA KECURANGAN AKUNTANSI. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(1), 389–417.
- Maulina, A., Alkamal, M., & Fahira, N. S. (2021). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, BELANJA MODAL, DAN UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research.*, 5(2), 523–531. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i2>

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah Dengan Belanja Sosial Sebagai Variabel Intervening**

- Mulyani, S., & Wibowo, H. (2017). Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2012-2015). *Kompartemen*, XV(1), 57–66.
- Putri, N. K. N. I., & Darmayanti, N. P. A. (2019). Pengaruh PAD Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(5), 2834. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i05.p09>
- Rafli, M. N., & Sari, V. F. (2021). Pengaruh PAD, SiIPA, dan Fiscal Stress terhadap Perubahan Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(3), 486–500. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i3.384>
- Ramadani, alkansa F., & Muslimin. (2022). Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal of Management and Bussines (JOMBussines (JOMB)*, 4, 362–372.
- Sari, N. M. D. P., & Mustanda, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(8), 4759. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i08.p02>
- Septiani, T. (2018). Analisis Kinerja Keuangan dan Tingkat Kemandirian Pemerintahan Kabupaten dan Kota Cirebon. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi (JAE)*, 3(1), 97–112.
- Simamora, W. C., & Budiwitjaksono, G. S. (2022). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2020. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 410. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.547>
- Sugiyono. (2013). METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R&D. In *Bandung: Alfabeta* (Vol. 3, Issue April).
- Verawaty, V., Jaya, A. K., Puspanita, I., & Nurhidayah, N. (2020). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *Mbia*, 19(1), 21–37. <https://doi.org/10.33557/mbia.v19i1.560>
- Wibisono, N., Purnomo, H., & Rahaju, E. E. (2021). Pengaruh PAD, DBH, DAU, dan SiLPA Terhadap Belanja Bantuan Sosial Pada Pemerintah Daerah Se-Bakorwil Madiun. *JAMER : Jurnal Akuntansi Merdeka*, 2(1), 6–11. <https://doi.org/10.33319/jamer.v2i1.44>
- Wismoyo Aji, M., Mukhibad, H., & Kunci, K. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Dan Governance Andalas*, 3(1), 97–115. www.jaga.unand.ac.id

